

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat(Todaro, 2015). Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Tajudin, 2023), karena PDRB mencerminkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi, sementara struktur PDRB menggambarkan sektor-sektor yang berperan dominan dalam menopang perekonomian. Untuk memberikan gambaran mengenai struktur perekonomian Kabupaten Bone, berikut Tabel 1.1 menyajikan distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bone menurut lapangan usaha selama periode 2019–2023.

Tabel 1.1 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha, 2019–2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,20	47,07	48,03	48,61	48,36
Pertambangan dan Penggalian	3,65	3,73	3,52	3,38	3,52
Industri Pengolahan	6,98	6,87	6,88	6,99	7,05
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09

Lanjutan Tabel 1.1

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	10,64	10,83	10,96	11,13	11,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,60	12,21	11,68	11,47	11,45
Transportasi dan Pergudangan	2,32	2,07	2,08	2,19	2,60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,53	0,49	0,47	0,49	0,49
Informasi dan Komunikasi	1,52	1,68	1,73	1,79	1,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,96	3,01	3,05	3,04	2,90
Real Estat	3,36	3,49	3,28	3,08	3,17
Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,61	4,61	4,50	4,28	4,05
Jasa Pendidikan	2,22	2,46	2,31	2,07	2,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	1,02	1,00	0,94	0,89
Jasa Lainnya	0,35	0,32	0,32	0,35	0,42
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bone

Berdasarkan Tabel 1.1, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menempati salah satu posisi utama dalam struktur PDRB Kabupaten Bone dibandingkan sektor-sektor lain seperti perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bone

masih sangat bergantung pada aktivitas primer berbasis sumber daya alam, khususnya sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian daerah (BPS Kabupaten Bone, 2024a).

Di provinsi sulawesi selatan sektor pertanian masih menempati posisi strategis dalam struktur PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan pangan, tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta penopang utama perekonomian perdesaan. Di antara subsektor pertanian, subsektor tanaman pangan memiliki peranan penting karena menghasilkan komoditas strategis seperti padi dan jagung yang berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan dinamika pertumbuhan PDRB daerah. Selain struktur PDRB, dinamika pertumbuhan ekonomi daerah juga penting untuk diperhatikan. berikut Tabel 1.2 menyajikan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone menurut lapangan usaha selama periode 2019–2023 berdasarkan harga konstan.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone Menurut Lapangan Usaha, 2019–2023 (ADHK 2010, persen)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,33	-0,95	7,43	5,09	2,71
Pertambangan dan Penggalian	9,28	1,85	1,10	2,42	2,70
Industri Pengolahan	16,62	-1,91	5,42	7,82	4,61
Pengadaan Listrik dan Gas	4,08	5,37	15,82	14,49	5,98
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,80	8,38	2,32	3,97	-3,31

Konstruksi	9,60	2,03	5,47	6,05	2,98
------------	------	------	------	------	------

Lanjutan Tabel 1.2

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,77	-2,92	2,10	4,45	4,70
Transportasi dan Pergudangan	11,49	-12,39	4,83	8,34	11,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,91	-9,80	2,94	8,78	7,91
Informasi dan Komunikasi	9,32	11,63	6,33	13,98	4,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	2,58	6,86	2,43	0,38
Real Estat	6,12	5,10	0,99	1,78	9,43
Jasa Perusahaan	10,62	-8,71	2,70	8,78	21,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	15,99	-0,21	4,35	4,74	0,60
Jasa Pendidikan	7,61	10,33	1,57	-0,82	12,94
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,96	12,63	5,18	4,32	1,57
Jasa Lainnya	9,75	-9,66	5,93	18,23	27,14
Produk Domestik Regional Bruto	7,01	-0,25	5,53	5,23	3,77

Sumber: BPS Kabuapten Bone

*: Data sementara

**: Data sementara dan belum pasti

Berdasarkan Tabel 1.2, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2019–2023. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor dominan PDRB tetap mengalami pertumbuhan positif pascapandemi, namun dengan laju yang

cenderung melambat pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor pertanian masih menjadi basis perekonomian daerah, kinerjanya relatif rentan terhadap tekanan eksternal dan belum sepenuhnya stabil. Fluktuasi pertumbuhan sektor pertanian tersebut memperkuat argumen bahwa besarnya kontribusi terhadap PDRB tidak selalu diikuti oleh kestabilan kinerja ekonomi, sehingga implikasinya terhadap kesejahteraan petani perlu dikaji lebih mendalam (BPS Kabupaten Bone, 2024b). Untuk melihat perkembangan kinerja ekonomi Kabupaten Bone secara agregat dan per kapita, Tabel 1.3 menyajikan data PDRB total dan PDRB per kapita Kabupaten Bone selama periode 2019–2023.

Tabel 1.3 Perkembangan PDRB total dan PDRB per kapita Kabupaten Bone selama periode 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	36.034,84	36.560,64	39.369,96	43.640,84	46.935,17
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	22.108,04	22.053,74	23.273,87	24.491,73	25.416,03
PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	47,81	45,68	48,67	53,48	57,02
PDRB per Kapita ADHK 2010 (Juta Rupiah)	29,33	27,56	28,77	30,01	30,88
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK (%)	7,18	-6,05	4,40	4,32	2,88
Jumlah Penduduk (jiwa)	758.590	801.780	808.944	816.013	823.079

Sumber: BPS Kabupaten Bone

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa secara makro PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Bone mengalami peningkatan selama periode 2019–2023. Meskipun demikian, peningkatan indikator makro tersebut belum secara otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani, khususnya petani tanaman pangan, karena PDRB lebih merepresentasikan kinerja produksi dibandingkan daya beli dan pendapatan riil pelaku sektor pertanian. (BPS Kabupaten Bone, 2024c)

Peranan subsektor tanaman pangan terhadap pertumbuhan PDRB menunjukkan bahwa aktivitas produksi pangan merupakan salah satu penggerak utama ekonomi wilayah, khususnya di kabupaten-kabupaten yang memiliki karakter agraris. Kontribusi subsektor ini tidak hanya tercermin dari besarnya nilai tambah yang dihasilkan, tetapi juga dari luasnya keterkaitan ekonomi yang ditimbulkannya, mulai dari kegiatan produksi, perdagangan hasil pertanian, transportasi, hingga industri pengolahan berbasis pangan. Dengan demikian, pertumbuhan PDRB pada wilayah agraris pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kinerja subsektor tanaman pangan.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang struktur perekonomiannya masih sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan. Kondisi geografis yang didominasi lahan pertanian serta besarnya proporsi penduduk yang menggantungkan hidup pada usaha tani menjadikan subsektor ini sebagai basis ekonomi daerah. Peranan subsektor tanaman pangan terhadap PDRB Kabupaten Bone menempatkannya tidak hanya sebagai penyumbang output regional, tetapi juga sebagai fondasi utama kehidupan ekonomi masyarakat perdesaan. Guna memperjelas peranan masing-masing subsektor dalam sektor pertanian, Tabel 1.4 menyajikan kontribusi subkategori pertanian terhadap nilai tambah sektor pertanian Kabupaten Bone selama periode pengamatan.

Tabel 1.4 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Sektor Pertanian
Kabupaten Bone (Persen) 2019-2023

Subkategori	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertanian, Pernakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian	52,47	53,45	51,89	49,79	50,02
Tanaman Pangan / Food Crops	32,59	33,31	32,94	31,02	30,49
Tanaman Hortikultura Semusim	1,20	1,19	1,12	1,21	1,29
Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1,44	1,43	1,27	1,24	1,18
Perkebunan Semusim	1,14	1,16	1,29	1,50	1,44
Perkebunan Tahunan	10,53	10,79	9,92	9,31	9,96
Pernakan	4,00	4,01	3,87	4,09	4,35
Jasa Pertanian dan Perburuan	1,57	1,57	1,48	1,44	1,32
Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,15	0,17	0,14	0,13	0,12
Perikanan	47,37	46,38	47,98	50,08	49,86
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Publikasi BPS kabupaten Bone

Berdasarkan Tabel 1.4, subsektor tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar nilai tambah dalam kelompok pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian Kabupaten Bone selama periode 2019–2023. Kontribusi tanaman pangan yang konsisten berada di atas 30 persen menunjukkan bahwa subsektor ini menjadi tulang punggung utama kegiatan pertanian darat di Kabupaten Bone. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dinamika sektor pertanian daerah tidak dapat dilepaskan dari kinerja subsektor tanaman pangan, sehingga perubahan produktivitas, biaya produksi, dan pendapatan pada subsektor ini akan sangat menentukan arah kontribusi pertanian terhadap PDRB sekaligus berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan petani (BPS kabupaten Bone, 2024)

Namun demikian, menurut Sukirno (2016) pertumbuhan PDRB dan besarnya peranan subsektor tanaman pangan dalam perekonomian daerah tidak secara otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani. PDRB pada dasarnya mengukur kinerja produksi dan nilai tambah, tetapi belum mampu menggambarkan kondisi daya beli dan pendapatan riil petani sebagai pelaku utama sektor tersebut. Dalam banyak wilayah agraris, sering dijumpai kondisi di mana subsektor tanaman pangan berkontribusi besar terhadap PDRB, tetapi petani masih menghadapi keterbatasan pendapatan, tingginya biaya produksi, serta tekanan kebutuhan hidup rumah tangga (Haris et al.2018).

Dalam konteks inilah kesejahteraan petani menjadi isu sentral yang perlu dikaji secara lebih spesifik. Salah satu indikator yang lazim digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP), yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP mencerminkan sejauh mana hasil usaha tani mampu memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi rumah tangga petani Badan Pusat Statistik (2023) . Oleh karena itu, analisis peranan subsektor tanaman pangan terhadap PDRB Kabupaten Bone perlu diikuti dengan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi NTP petani tanaman pangan.

Meskipun subsektor tanaman pangan memiliki peranan penting dalam pembentukan dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone, kondisi kesejahteraan petani tidak selalu bergerak searah dengan peningkatan output ekonomi tersebut. Petani tanaman pangan sering dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, seperti keterbatasan luas lahan garapan, ketergantungan pada input produksi yang semakin mahal, fluktuasi hasil panen, serta tekanan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan peningkatan produksi atau kontribusi terhadap PDRB belum tentu diikuti oleh peningkatan pendapatan riil dan daya beli petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator yang relevan untuk menggambarkan dinamika kesejahteraan petani tanaman pangan, karena NTP mencerminkan perbandingan antara harga yang diterima petani dari hasil produksinya dan harga yang dibayar petani untuk kebutuhan produksi serta konsumsi rumah tangga. Secara konseptual, NTP akan meningkat apabila pendapatan petani dari usaha tani tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pengeluaran yang harus ditanggung. Sebaliknya, NTP akan tertekan apabila kenaikan biaya input dan konsumsi tidak diimbangi oleh peningkatan nilai produksi. Oleh karena itu, NTP tidak hanya mencerminkan kinerja subsektor tanaman pangan, tetapi juga menunjukkan posisi ekonomi petani dalam struktur perekonomian daerah (Keumala and Zainuddin, 2018).

Dalam konteks Kabupaten Bone yang perekonomiannya masih bertumpu pada subsektor tanaman pangan, dinamika NTP menjadi semakin penting untuk dikaji. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap usaha tani menjadikan fluktuasi NTP berimplikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi perdesaan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani. Menurut Haris, Sarma and Falatehan (2018b) apabila peranan subsektor tanaman pangan terhadap PDRB terus meningkat tanpa diiringi perbaikan NTP, maka pertumbuhan ekonomi daerah berpotensi bersifat tidak inklusif dan kurang mampu meningkatkan kualitas hidup petani sebagai pelaku utama sektor tersebut.

Secara teoritis dan empiris, kesejahteraan petani yang tercermin melalui NTP tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga output, tetapi juga oleh karakteristik usaha tani dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga petani. Luas lahan garapan menentukan skala usaha dan kapasitas produksi, sehingga berpengaruh terhadap potensi pendapatan yang dapat diperoleh petani. Modal input, yang mencakup pengeluaran untuk benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja, memengaruhi produktivitas sekaligus struktur biaya produksi yang ditanggung petani. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga mencerminkan tekanan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dari hasil usaha tani, sehingga berperan dalam menentukan kemampuan daya beli petani. Interaksi ketiga faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk tingkat NTP petani tanaman pangan.

Namun demikian, sebagian besar kajian mengenai Nilai Tukar Petani masih banyak dilakukan pada tingkat nasional atau provinsi dengan menitikberatkan pada faktor-faktor makro, seperti kebijakan harga, subsidi, dan fluktuasi pasar global. Penelitian yang mengkaji determinan NTP pada skala kabupaten, khususnya dengan menekankan faktor-faktor mikro usaha tani, relatif masih terbatas. Padahal, karakteristik daerah, struktur kepemilikan lahan, kemampuan permodalan petani, serta pola konsumsi rumah tangga berbeda antarwilayah dan berpotensi menghasilkan dinamika NTP yang tidak seragam.

Kabupaten Bone memiliki karakter agraris yang khas, baik dari sisi luas wilayah pertanian, komoditas tanaman pangan yang diusahakan, maupun struktur sosial ekonomi petaninya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi NTP petani tanaman pangan di Kabupaten Bone, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai mekanisme yang membentuk kesejahteraan petani di tingkat lokal. Pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi menjadi penting untuk mengidentifikasi seberapa besar dan seberapa signifikan pengaruh luas lahan, modal input, dan konsumsi rumah tangga terhadap NTP petani tanaman pangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis determinan Nilai Tukar Petani tanaman pangan di Kabupaten Bone. Penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan peranan subsektor tanaman pangan dalam perekonomian daerah, tetapi juga mengungkap faktor-faktor utama yang menentukan tingkat kesejahteraan petani, dan Penelitian ini tidak bertujuan membuktikan bahwa NTP Kabupaten Bone berada pada kondisi rendah, melainkan untuk mengukur dan menganalisis kondisi NTP petani tanaman pangan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kontribusi terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kesejahteraan petani tanaman pangan secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah terdapat pengaruh luas lahan terhadap nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan di Kabupaten Bone?
2. Apakah terdapat pengaruh perubahan modal yang digunakan petani terhadap peningkatan nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan di Kabupaten Bone?
3. Apakah terdapat pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan di Kabupaten Bone?

1.3 Tujuan penelitian

1. Mengidentifikasi pengaruh luas lahan terhadap nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan di Kabupaten Bone.
2. Mengidentifikasi pengaruh perubahan modal yang digunakan petani terhadap peningkatan nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan di Kabupaten Bone.
3. Mengidentifikasi pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan di Kabupaten Bone.

1.4 Manfaat penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang nilai tukar petani (NTP), khususnya dengan menyoroti faktor-faktor lokal yang selama ini kurang diperhatikan dalam kajian ekonomi pertanian.
2. Memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya teori-teori tentang kesejahteraan petani, hubungan antara harga, akses input pertanian, infrastruktur, serta pengaruh perubahan iklim terhadap NTP.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi petani dan lembaga pertanian dalam merancang program-program yang mampu meningkatkan produktivitas, akses teknologi, serta daya saing petani lokal.
4. Secara langsung dapat mendukung peningkatan kualitas hidup petani di Kabupaten Bone melalui strategi yang lebih sesuai dengan kondisi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Grand Theory

a) Teori Struktur pasar

Teori struktur pasar membahas mengenai bagaimana karakteristik pasar memengaruhi perilaku pelaku ekonomi, khususnya dalam hal penentuan harga dan jumlah output. Menurut pemikiran Edward Chamberlin dan Joan Robinson, struktur pasar dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yaitu persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan monopsoni. Masing-masing struktur pasar memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal jumlah pelaku, kekuatan pasar, serta kemampuan dalam menentukan harga.

Dalam konteks sektor pertanian, petani umumnya berada dalam kondisi pasar persaingan sempurna pada sisi produksi, di mana jumlah penjual sangat banyak dan produk yang dihasilkan relatif homogen. Kondisi ini menyebabkan petani tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga (price taker), sehingga harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Namun, dalam praktiknya, kondisi pasar pertanian seringkali tidak sepenuhnya kompetitif, terutama pada sisi distribusi dan pemasaran hasil pertanian.

Pada sisi output, petani seringkali menghadapi struktur pasar monopsoni, di mana hanya terdapat sedikit pembeli seperti tengkulak atau pedagang besar yang memiliki kekuatan dalam menentukan harga beli. Kondisi ini menyebabkan harga hasil pertanian cenderung lebih rendah dari harga yang seharusnya diterima petani. Sementara itu, pada sisi input, petani sering menghadapi pasar oligopoli, di mana hanya terdapat beberapa produsen besar yang menguasai pasar pupuk, benih, dan alat pertanian, sehingga harga input menjadi relatif tinggi.

Kondisi ketidakseimbangan struktur pasar tersebut memiliki dampak langsung terhadap Nilai Tukar Petani (NTP). Rendahnya harga jual hasil pertanian dan tingginya harga input menyebabkan pendapatan petani menurun, sementara pengeluaran meningkat, sehingga NTP menjadi rendah. Sebaliknya, apabila struktur pasar lebih kompetitif dan adil, maka petani dapat memperoleh harga jual yang lebih baik dan harga input yang lebih terjangkau, sehingga NTP akan meningkat. Oleh karena itu, teori struktur pasar sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pasar memengaruhi kesejahteraan petani.

b) Surplus Teori

Teori surplus merupakan salah satu konsep fundamental dalam ekonomi yang menjelaskan adanya kelebihan nilai yang dihasilkan dari suatu aktivitas produksi setelah seluruh biaya faktor produksi terpenuhi. Dalam perspektif ekonomi klasik, sebagaimana dikemukakan oleh David Ricardo, surplus dipandang sebagai residu dari proses produksi yang kemudian terdistribusi dalam bentuk sewa, upah, dan keuntungan. Dengan demikian, surplus tidak hanya merepresentasikan kelebihan pendapatan, tetapi juga mencerminkan efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan ekonomi.

Dalam konteks sektor pertanian, surplus dapat dimaknai sebagai selisih antara total penerimaan petani dari hasil penjualan komoditas dengan total biaya produksi yang dikeluarkan. Komponen biaya tersebut mencakup penggunaan input seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, serta biaya operasional lainnya. Besaran surplus sangat ditentukan oleh interaksi antara harga output dan struktur biaya produksi, di mana peningkatan harga output atau efisiensi biaya akan mendorong peningkatan surplus yang diterima petani.

Lebih lanjut, dinamika surplus dalam sektor pertanian sangat sensitif terhadap perubahan harga relatif, baik pada sisi input maupun output. Kenaikan harga input yang tidak diimbangi dengan peningkatan harga output akan menekan margin keuntungan petani, sehingga mengurangi surplus yang

diperoleh. Sebaliknya, peningkatan harga output dalam kondisi biaya produksi yang relatif stabil akan memperbesar surplus. Oleh karena itu, stabilitas harga dan efisiensi penggunaan input menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan surplus pertanian.

Keterkaitan antara teori surplus dan Nilai Tukar Petani (NTP) terletak pada kemampuannya dalam merefleksikan kesejahteraan ekonomi petani. NTP sebagai rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani secara implisit mencerminkan perubahan surplus yang diterima. Peningkatan surplus akan meningkatkan daya beli dan pendapatan riil petani, sehingga NTP cenderung meningkat. Sebaliknya, penurunan surplus akibat tekanan biaya atau penurunan harga output akan berdampak pada penurunan NTP. Dengan demikian, teori surplus memberikan landasan analitis dalam memahami perubahan kesejahteraan petani melalui indikator NTP.

c) Teori Marginal Product of Labor (MPL)

Teori Marginal Product of Labor (MPL) merupakan bagian dari teori produksi dalam ekonomi neoklasik yang menjelaskan hubungan antara penggunaan tenaga kerja dengan output yang dihasilkan. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Alfred Marshall. MPL didefinisikan sebagai tambahan output yang dihasilkan akibat penambahan satu unit tenaga kerja, dengan asumsi faktor produksi lainnya tetap (*ceteris paribus*). Konsep ini digunakan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dalam suatu proses produksi.

Dalam praktiknya, penambahan tenaga kerja tidak selalu menghasilkan peningkatan output yang proporsional. Pada tahap awal, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan output secara signifikan karena adanya pembagian kerja dan efisiensi. Namun, setelah mencapai titik tertentu, tambahan tenaga kerja justru akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil, yang dikenal dengan hukum penurunan hasil tambahan (*law of diminishing*

returns). Hal ini terjadi karena keterbatasan faktor produksi lain seperti lahan dan modal.

Dalam sektor pertanian, penggunaan tenaga kerja yang efisien sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Jika jumlah tenaga kerja terlalu banyak dibandingkan dengan luas lahan yang tersedia, maka produktivitas per tenaga kerja akan menurun. Sebaliknya, jika tenaga kerja digunakan secara optimal dan didukung oleh teknologi yang memadai, maka produktivitas dapat meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga kerja yang tepat menjadi faktor penting dalam meningkatkan hasil produksi pertanian.

Keterkaitan teori MPL dengan Nilai Tukar Petani (NTP) terletak pada pengaruh produktivitas terhadap pendapatan petani. Peningkatan produktivitas tenaga kerja akan meningkatkan output yang dihasilkan, sehingga pendapatan petani juga meningkat. Hal ini akan berdampak positif terhadap NTP karena meningkatkan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi. Sebaliknya, produktivitas yang rendah akibat penggunaan tenaga kerja yang tidak efisien akan menyebabkan pendapatan petani stagnan atau menurun, sehingga NTP juga cenderung rendah. Dengan demikian, teori MPL dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana efisiensi produksi memengaruhi kesejahteraan petani.

2.1.2 Teori Dasar

a) Teori Skala Ekonomi (Adam Smith)

Teori Skala Ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya skala usaha, efisiensi dalam proses produksi juga akan meningkat. Dalam sektor pertanian, hal ini berarti bahwa dengan memperluas luas lahan yang dikelola, petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk alat dan tenaga kerja, sehingga biaya produksi per satuan hasil dapat lebih rendah. Dengan kata lain, semakin luas lahan yang dikelola, semakin besar pula kapasitas produksi yang dapat dicapai, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani.

Peningkatan skala usaha dalam pertanian memungkinkan petani untuk memanfaatkan teknologi dan alat produksi yang lebih efisien, seperti penggunaan mesin untuk pengolahan tanah atau panen. Selain itu, dengan jumlah produksi yang lebih besar, petani juga dapat menekan biaya tetap yang diperlukan untuk operasional, seperti biaya pembelian mesin atau infrastruktur. Hal ini berimbas pada penurunan biaya produksi per unit, sehingga margin keuntungan petani semakin besar.

Sebagai konsekuensinya, peningkatan efisiensi produksi ini berdampak pada kesejahteraan petani, yang tercermin dalam kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Ketika biaya produksi dapat ditekan dan pendapatan meningkat, petani memperoleh keuntungan yang lebih besar, karena pendapatan yang dihasilkan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, teori skala ekonomi dalam konteks pertanian menunjukkan bahwa dengan memperbesar skala usaha, petani dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, dan memperbaiki kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Selain itu, skala ekonomi dalam pertanian juga dapat meningkatkan daya saing petani di pasar. Dengan semakin besar skala produksi, petani memiliki kesempatan untuk memanfaatkan ekonomi pasar yang lebih luas, seperti mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah atau menjual produk dalam jumlah besar dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini tidak hanya menguntungkan petani dalam hal pengurangan biaya produksi, tetapi juga memberikan mereka posisi tawar yang lebih baik ketika berhadapan dengan pemasok atau pembeli. Seiring dengan peningkatan efisiensi dan daya saing, petani dapat menghadapi fluktuasi harga pasar dengan lebih baik dan meningkatkan stabilitas pendapatan mereka, yang pada gilirannya mendukung kelangsungan usaha pertanian yang lebih berkelanjutan (Adam Smith, 1776).

b) Teori Produksi Neoklasik (Solow & Paul Douglas)

Teori Produksi Neoklasik, yang dijelaskan melalui model produksi Cobb-Douglas oleh Robert Solow dan Paul Douglas, menyoroti peran penting

modal dalam mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Dalam konteks ini, modal mencakup berbagai bentuk investasi seperti alat pertanian, teknologi, bibit unggul, serta infrastruktur pendukung lainnya. Peningkatan modal ini akan berkontribusi pada peningkatan efisiensi produksi dan hasil yang lebih optimal dari lahan yang dikelola petani.

Dengan adanya tambahan modal, petani dapat memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dan meningkatkan kualitas input produksi. Sebagai contoh, penggunaan alat pertanian modern dan sistem irigasi yang efisien memungkinkan petani untuk meningkatkan hasil panen tanpa harus memperluas lahan. Teknologi yang lebih baik juga membantu mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Akibat dari peningkatan produktivitas tersebut, pendapatan petani akan mengalami kenaikan, yang pada gilirannya akan memperbaiki kesejahteraan mereka, tercermin dalam peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Ketika pendapatan yang diterima petani lebih besar daripada pengeluaran mereka, maka daya beli mereka akan meningkat, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, teori produksi neoklasik menggarisbawahi bahwa dengan meningkatnya modal dalam usaha pertanian, petani bisa memperoleh hasil yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, dan kesejahteraan yang lebih baik pula.

Selain itu, penerapan teori ini juga dapat meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam menghadapi persaingan global. Akses yang lebih besar terhadap modal memberi kesempatan bagi petani untuk memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas, baik di pasar domestik maupun internasional. Investasi dalam teknologi dan infrastruktur pertanian tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif, memungkinkan petani menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang lebih rendah. Ini membuka peluang bagi petani untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi pada ketahanan pangan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan memperkuat akses petani terhadap

modal, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berperan dalam pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan dan perekonomian secara lebih luas (Douglas, 1948; Solow, 1956).

c) Teori Pendapatan Riil (Alfred Marshall)

Teori Pendapatan Riil (Real Income Theory) yang berakar pada pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik, khususnya dari tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam teori perilaku konsumen modern. Teori ini menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga tidak ditentukan oleh pendapatan nominal semata, melainkan oleh pendapatan riil, yaitu pendapatan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga, karena pendapatan riil yang mencerminkan daya beli sesungguhnya. Semakin tinggi pendapatan riil seseorang, semakin besar kemampuan rumah tangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan pokok maupun non-pokok.

Kegunaan teori ini adalah untuk menjelaskan mengapa kenaikan pendapatan tidak selalu diikuti peningkatan konsumsi apabila diiringi oleh kenaikan harga, serta untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat berdasarkan kemampuan daya belinya. Dalam konteks penelitian yang melibatkan NTP, teori ini sangat relevan karena NTP merupakan indikator pendapatan riil petani, yang membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Ketika NTP meningkat dan berada di atas 100, berarti daya beli petani membaik, sehingga berdasarkan teori pendapatan riil, kondisi tersebut akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, ketika NTP menurun di bawah 100, pendapatan riil petani melemah dan konsumsi rumah tangga cenderung tertekan.

d) Teori Nilai tukar (David Ricardo)

Teori Nilai Tukar Petani (NTP) berasal dari konsep *terms of trade* dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan perbandingan antara harga barang yang dijual dengan harga barang yang dibeli oleh suatu pihak. Konsep ini telah berkembang sejak teori perdagangan internasional klasik yang

dikemukakan oleh David Ricardo pada abad ke-19, yang menekankan pentingnya harga relatif dalam menentukan keuntungan suatu sektor ekonomi. Dalam perkembangannya, khususnya pada kajian ekonomi pertanian sekitar tahun 1950–1970-an melalui pemikiran tokoh seperti Theodore W. Schultz serta Johnston dan Mellor, konsep nilai tukar kemudian digunakan untuk melihat posisi ekonomi petani dalam proses pembangunan. Dari sinilah muncul indikator Nilai Tukar Petani yang digunakan untuk menilai tingkat daya beli dan kesejahteraan petani.

Secara umum, Nilai Tukar Petani menggambarkan kemampuan petani dalam menukarkan hasil produksi pertanian dengan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan produksi. Petani memiliki peran ganda, yaitu sebagai produsen hasil pertanian sekaligus konsumen barang kebutuhan hidup dan sarana produksi. Oleh karena itu, perubahan harga hasil pertanian, harga input produksi, serta biaya kebutuhan hidup sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi petani. Dalam hal ini, teori NTP menekankan bahwa kesejahteraan petani sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara pendapatan dari hasil pertanian dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan.

Secara perhitungan, Nilai Tukar Petani diperoleh dari perbandingan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) kemudian dikalikan 100. Indeks harga yang diterima petani mencerminkan perkembangan harga komoditas pertanian yang dijual, sedangkan indeks harga yang dibayar petani meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga serta biaya produksi seperti pupuk, benih, pestisida, dan tenaga kerja. Jika nilai NTP lebih dari 100, berarti pendapatan petani relatif lebih besar dibandingkan pengeluarannya sehingga daya beli dan kesejahteraan petani meningkat. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 100, maka kondisi tersebut menunjukkan penurunan daya beli petani.

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan, NTP sering digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi ekonomi petani, terutama dalam jangka pendek. Peningkatan NTP biasanya menunjukkan adanya kenaikan

pendapatan riil petani dan kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun mengembangkan usaha tani. Namun demikian, NTP memiliki keterbatasan karena hanya menitikberatkan pada aspek harga dan belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan secara menyeluruh, seperti aspek pendidikan, kesehatan, dan kepemilikan aset.

Secara keseluruhan, teori Nilai Tukar Petani menjelaskan bahwa kesejahteraan petani sangat dipengaruhi oleh perubahan harga relatif antara hasil pertanian dengan kebutuhan konsumsi serta biaya produksi. Oleh karena itu, indikator NTP menjadi salah satu alat penting dalam analisis ekonomi pertanian untuk mengevaluasi kondisi kesejahteraan petani dan efektivitas kebijakan pembangunan sektor pertanian.

2.2 Studi Empiris

Penelitian oleh Purwanti and Wahono (2024) yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa fluktuasi harga gabah berpengaruh besar terhadap daya beli petani. Ketika harga hasil pertanian turun, petani cenderung kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya produksi, yang akhirnya menyebabkan penurunan NTP. Temuan ini sejalan dengan pandangan fisiokrat, yang menyatakan bahwa kesejahteraan petani sangat bergantung pada surplus pertanian yang dihasilkan dan kemampuan untuk mendistribusikan hasil tersebut secara efisien ke pasar.

Penelitian oleh Murdy (2017) menemukan bahwa rendahnya nilai tukar petani berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dengan pelaku pelaku pada sektor pertanian. Hal ini diakibatkan oleh lebih besarnya biaya yang dikeluarkan oleh petani dibanding dengan harga yang mereka terima.

Penelitian oleh Mokgomo, et al (2022) menemukan bahwa Intervensi pemerintah melalui subsidi dan penetapan harga dasar sangat penting untuk menjaga kestabilan pasar pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan pasokan pangan yang cukup bagi masyarakat. Tanpa dukungan tersebut, sektor pertanian rawan terhadap fluktuasi harga dan risiko kerugian yang dapat berdampak pada ketahanan pangan negara.

Penelitian oleh Ume (2023) menemukan bahwa Petani yang terlibat dalam kerjasama berbasis pasar atau orientasi pasar cenderung lebih efisien karena terdorong untuk mengadopsi teknologi, memperbaiki manajemen, dan meningkatkan kualitas hasil.

Penelitian oleh Mulyono et al (2023) menemukan bahwa kenaikan harga pupuk dan benih tanpa diimbangi dengan kenaikan harga hasil pertanian dapat mengurangi surplus yang diterima petani. Hal ini sesuai dengan teori fisiokrat yang menekankan bahwa efisiensi biaya produksi penting untuk menjaga stabilitas surplus pertanian. Jika biaya input meningkat sementara hasil pertanian tidak dapat menutupi biaya tersebut, maka NTP petani akan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Penelitian oleh Ramadhanu, Ginting and Ayu (2021) di Sumatera Utara menemukan bahwa faktor alam seperti kekeringan atau banjir dapat menurunkan hasil panen dan menciptakan ketidakpastian pendapatan bagi petani. Dalam kerangka fisiokrat, yang menganggap bahwa pertanian adalah sumber utama kekayaan, ketidakstabilan hasil pertanian ini menjadi salah satu penghalang utama terciptanya surplus yang dapat didistribusikan ke masyarakat, sehingga memengaruhi NTP.

Penelitian lebih lanjut oleh Effendi et al. (2023) menggunakan regresi komponen utama (PCR) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Farmer Exchange Rate (FER) di sektor tanaman pangan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan, produksi, dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) berpengaruh signifikan terhadap NTP. Temuan ini mendukung teori fisiokrat yang menekankan pentingnya produktivitas pertanian dan distribusi surplus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan akses petani terhadap teknologi, serta peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan dan layanan kesehatan, dapat meningkatkan NTP.

Penelitian oleh Tenriawaru et al. (2021) di Sulawesi Selatan juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti harga gabah, biaya teknologi, dan pengeluaran rumah tangga petani mempengaruhi NTP secara signifikan. Penelitian ini mencatat bahwa meskipun harga gabah mengalami fluktuasi, petani

yang memiliki akses ke teknologi pertanian yang lebih baik dan pengelolaan rumah tangga yang efisien cenderung bisa bertahan lebih lama dalam menghadapi krisis harga. Hal ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan petani melalui akses terhadap teknologi dan pembiayaan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

2.4 Kerangka Berpikir

Analisis hubungan antar variabel seperti luas lahan, modal, konsumsi rumah tangga, dan nilai tukar petani (NTP) sangat penting untuk memahami dinamika sektor pertanian, terutama dalam konteks daya beli petani terhadap barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi pertanian. NTP menjadi indikator yang menggambarkan kesejahteraan petani, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Setiap faktor memiliki keterkaitan yang signifikan dan saling mempengaruhi dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani, serta menjadi dasar analisis yang penting untuk mengoptimalkan sektor pertanian.

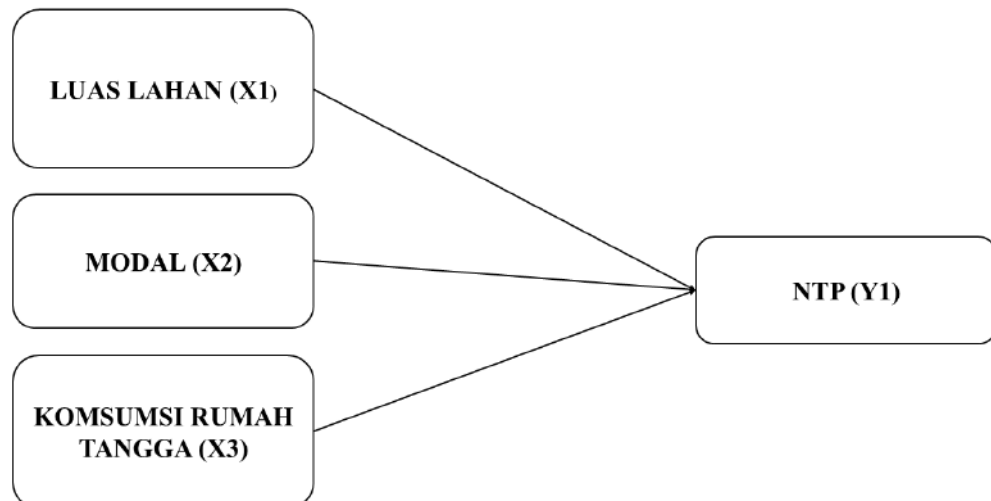
Luas lahan yang dikelola petani memiliki hubungan langsung dengan kapasitas produksi pertanian mereka. Semakin luas lahan yang dimiliki petani, semakin besar potensi hasil yang dapat dicapai, yang berarti peningkatan pendapatan dan nilai tukar petani (NTP). Dengan lebih banyak hasil pertanian, petani dapat meningkatkan daya beli mereka, yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, pengelolaan lahan yang lebih luas memerlukan lebih banyak modal, tenaga kerja, dan teknologi yang memadai. Petani dengan luas lahan terbatas mungkin menghadapi kendala dalam mencapai hasil yang optimal tanpa dukungan tersebut. Oleh karena itu, meskipun luas lahan berpengaruh positif terhadap NTP, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan petani untuk mengelola lahan secara efektif dengan akses yang memadai ke modal, teknologi, dan tenaga kerja.

Modal memainkan peran yang sangat penting dalam kegiatan pertanian, karena dengan modal yang cukup, petani dapat membeli input produksi seperti pupuk, benih, dan alat pertanian yang dibutuhkan. Selain itu, modal juga memungkinkan petani untuk mengakses teknologi yang lebih maju, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi pertanian mereka. Menurut Wang et al. (2022)

dengan peningkatan modal, petani memiliki kesempatan untuk memperbaiki infrastruktur pertanian mereka dan meningkatkan kualitas hasil pertanian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tukar petani (NTP). Namun, jika akses terhadap modal terbatas, potensi pertanian bisa terhambat, karena petani tidak dapat membeli teknologi atau input yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Oleh karena itu, modal tidak hanya berperan dalam meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga dalam memperkenalkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi dan kualitas hasil, yang berpengaruh langsung terhadap NTP mereka.

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena mencerminkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan. Besar kecilnya konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan riil yang diterima. Dalam konteks rumah tangga petani, indikator yang sering digunakan untuk melihat kondisi pendapatan riil sekaligus daya beli adalah Nilai Tukar Petani (NTP), yaitu perbandingan antara harga yang diterima petani dari hasil produksi dengan harga yang harus dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi dan biaya produksi. Ketika NTP mengalami peningkatan, maka daya beli petani juga meningkat sehingga rumah tangga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk meningkatkan konsumsi. Sebaliknya, apabila NTP menurun, maka kemampuan konsumsi rumah tangga petani cenderung ikut menurun. Namun, hubungan antara konsumsi rumah tangga dan NTP tidak hanya bersifat satu arah, melainkan dapat terjadi hubungan timbal balik. Hal ini terutama jika konsumsi dipahami sebagai konsumsi yang bersifat produktif. Artinya, konsumsi tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendukung kegiatan produksi, seperti pengeluaran untuk makanan bergizi yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pendidikan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta biaya transportasi dan akses informasi yang mempermudah kegiatan usaha tani. Konsumsi yang bersifat produktif tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

Peningkatan produktivitas dan pendapatan ini kemudian akan berdampak pada kenaikan NTP, karena harga yang diterima petani menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran yang harus dibayarkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang bersifat dua arah antara konsumsi rumah tangga dan NTP. Di satu sisi, peningkatan NTP akan mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga, dan di sisi lain, konsumsi yang bersifat produktif juga dapat meningkatkan NTP melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan petani



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

1. Luas lahan yang dikelola petani memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan di Kabupaten Bone.
2. Modal yang digunakan petani memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan di Kabupaten Bone.

3. Konsumsi rumah tangga pertanian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan di Kabupaten Bone.

